

Evaluasi Program Sukabumi Kelurahan Entrepreneurship Center (SUKABUMI KECE) Dalam Meningkatkan Potensi Ekonomi Kreatif di Kota Sukabumi Jawa Barat

Fauziani Fikriyah¹, Riny Handayani²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

*Corresponding author: fauzianifikryah@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima [21 Desember 2024]

Revisi [15 Januari 2025]

Diterima Untuk Publikasi [15 Februari 2025]

Dipublikasikan [24 Februari 2025]

KATA KUNCI

Program Sukabumi Kece; Evaluasi Program; Ekonomi Kreatif

KEYWORDS

Sukabumi Kece Program; Program Evaluation; Creative Economy

This work is licensed under a:



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Sukabumi Kelurahan Entrepreneurship Center (SUKABUMI KECE) sebagai inisiatif strategis Pemerintah Kota Sukabumi dalam mendorong pengembangan potensi ekonomi kreatif masyarakat. Secara khusus, studi ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian (research gap) yang terdapat pada aspek efektivitas kebijakan dan mekanisme monitoring program, yang selama ini belum banyak dikaji secara sistematis. Program Sukabumi Kece telah mencetak lebih dari 1.500 wirausaha baru, namun belum disertai dengan indikator kinerja terukur dan dokumentasi yang memadai mengenai keberlanjutan dan dampaknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori evaluasi Leo Agustino (2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program SUKABUMI KECE dalam meningkatkan potensi ekonomi kreatif di Kota Sukabumi masih belum optimal karena beberapa indikator diantaranya sumber daya manusia tidak efisien karena jumlah personil tidak sebanding dengan beban kerja, sistem monitoring dan evaluasi yang tidak terstruktur, keterbatasan anggaran, serta tidak adanya pedoman teknis kegiatan. Pemerintah Kota Sukabumi, melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan, telah berupaya menjalankan Program SUKABUMI KECE. Namun, agar hasilnya lebih optimal, diperlukan pedoman teknis yang lebih jelas sebagai acuan dalam pelaksanaan program. Selain itu, pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang lebih konkret terkait pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM di Kota Sukabumi. Konsistensi dalam pelaksanaan program juga menjadi hal yang perlu diperhatikan agar penyelenggara dapat bekerja secara efektif. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, pemerintah dapat menjalin kemitraan dengan berbagai pihak guna mendukung keberlanjutan program ini.

ABSTRACT

This research aims to evaluate the Sukabumi Kelurahan Entrepreneurship Center Program (Sukabumi Kece) as a strategic initiative of the Sukabumi City Government in promoting the development of the community's creative economic potential. Specifically, this study aims to fill the research gap in the aspects of policy effectiveness and program monitoring mechanisms, which have not been systematically examined so far. The Sukabumi Kece program has produced more than 1,500 new entrepreneurs, but it has not been accompanied by measurable performance indicators and adequate documentation regarding its sustainability and impact. This research uses a descriptive qualitative method based on Leo Agustino's evaluation theory (2023). The research results show that the SUKABUMI KECE Program in enhancing the creative economic potential in Sukabumi City is still not optimal due to several indicators, including inefficient human resources as the number of personnel is not proportional to the workload, an unstructured monitoring and evaluation system, budget limitations, and the absence of technical activity guidelines. The Sukabumi City Government, through the Office of Cooperatives, Micro Enterprises, Industry, and Trade, has been making efforts to implement the SUKABUMI KECE Program. However, to achieve more optimal results, clearer technical guidelines are needed as a reference in the

implementation of the program. In addition, the government needs to establish more concrete policies related to the development of the creative economy and MSMEs in Sukabumi City. Consistency in program implementation is also something that needs to be considered so that the organizers can work effectively. To address budget constraints, the government can establish partnerships with various parties to support the sustainability of this program.

Pendahuluan

Ekonomi kreatif di Indonesia mulai berkembang pesat pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang ditandai dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Dalam Inpres tersebut, ekonomi kreatif didefinisikan sebagai aktivitas ekonomi berbasis kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan nilai tambah yang memiliki dampak ekonomi serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Selanjutnya, Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perpres No. 6 Tahun 2009 membentuk Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang mengembangkan 16 subsektor ekonomi kreatif. Enam subsektor utama yang menjadi fokus pengembangan adalah kriya, kuliner, fashion, film, pengembangan game, dan musik, karena memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan sumber daya alam dan manusia yang melimpah, ekonomi kreatif diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam mempercepat pembangunan ekonomi nasional (Bisnis.tempo.co, 2017).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 menjadi regulasi pertama yang secara khusus mengatur tentang ekonomi kreatif. Berdasarkan undang-undang tersebut, Provinsi Jawa Barat menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No. 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pergub Jabar No. 69 Tahun 2019. Laporan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif di Jawa Barat memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ekonomi kreatif mencapai 20,73% dari PDB ekonomi kreatif nasional. Subsektor utama yang mendominasi bisnis ekonomi kreatif di Jawa Barat adalah kriya (27,1%), kuliner (26,4%), dan fashion (16,7%) (tasransel.kemenparekraf.go.id, 2023).

Selain berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, ekonomi kreatif juga berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Permasalahan kemiskinan yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk di kota dan kabupaten, menjadi tantangan nasional yang perlu diatasi. Faktor-faktor seperti ketimpangan ekonomi, keterbatasan akses terhadap lapangan kerja, serta rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab utama tingginya angka pengangguran. Data yang dirilis oleh Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2022 menunjukkan bahwa dari sembilan kota besar di Jawa Barat.

Tabel 1. 1

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota (Persen) Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023

No	Wilayah Jawa Barat	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota (Persen)		
		2021	2022	2023
1	Kota Cimahi	13,07	10,77	10,52
2	Kota Bogor	11,79	10,78	9,39

3	Kota Bandung	11,46	9,55	8,83
4	Kota Sukabumi	10,78	8,83	8,53
5	Kota Bekasi	10,88	8,81	7,90
6	Kota Cirebon	10,53	8,42	7,66
7	Kota Depok	9,76	7,82	6,97
8	Kota Tasikmalaya	7,66	6,62	6,55
9	Kota Banjar	6,09	5,53	5,43

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, 2023

Dalam tabel 1.1 terlihat bahwa Kota Sukabumi menempati posisi keempat dengan tingkat pengangguran sebesar 8,53% pada tahun 2023. Pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka di Kota Sukabumi mencapai 10,78%, kemudian mengalami penurunan menjadi 8,83% pada tahun 2022, dan kembali turun sebesar 0,3% menjadi 8,53% pada tahun 2023 (radarsukabumi, 2023). Meskipun mengalami penurunan, laju penurunan pengangguran di Kota Sukabumi tidak secepat daerah lain di Jawa Barat.

Kota Sukabumi memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif yang berasal dari kekayaan budaya lokal, kreativitas masyarakat, dan pertumbuhan sektor usaha kecil menengah. Subsektor seperti kuliner, kriya, fesyen, serta seni pertunjukan menjadi kekuatan utama yang menggerakkan ekonomi kreatif di Kota Sukabumi. Berdasarkan Laporan Sukabumi Creative Hub pada tahun 2023 terdapat lebih dari 500 pelaku ekonomi kreatif aktif di Kota Sukabumi, dengan pertumbuhan jumlah usaha kreatif yang terus meningkat setiap tahunnya (sukabumiupdate.com, 2024).

Namun demikian, di balik potensi tersebut, masih terdapat berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam optimalisasi pengembangan ekonomi kreatif di Kota Sukabumi. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya pemanfaatan teknologi digital di kalangan pelaku usaha kreatif, yang berdampak pada terbatasnya jangkauan pasar dan rendahnya nilai tambah produk. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat terhadap program-program pendukung seperti SUKABUMI KECE belum merata di seluruh kelurahan, sehingga menciptakan kesenjangan perkembangan antar wilayah. Permasalahan lainnya adalah ketergantungan pelaku usaha terhadap dukungan pemerintah tanpa adanya kemandirian yang kuat, serta keterbatasan dalam pengelolaan hak kekayaan intelektual yang membuat produk lokal rentan terhadap plagiarisme. Infrastruktur pendukung seperti *co-working space*, inkubator bisnis, dan fasilitas pemasaran juga belum optimal, menghambat pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif baru.

Dalam menghadapi tantangan ini, Pemerintah Kota Sukabumi merancang Program Sukabumi Kelurahan Entrepreneurship Center (Sukabumi Kece) sebagai upaya strategis untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan potensi ekonomi kreatif di masyarakat. Namun, pelaksanaan program ini menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pada tahun 2020, dana tersebut dialihkan untuk penanggulangan COVID-19, sehingga program Sukabumi Kece tidak dapat berjalan secara optimal. Selain itu, alokasi dana dari DBHCHT yang tersedia tidak mencukupi untuk memberikan pembinaan jangka panjang kepada peserta yang baru memulai usaha.

Tantangan lainnya mencakup ketidaksesuaian antara pelaksanaan program dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam lima tahun terakhir, program ini memiliki persyaratan seleksi bagi peserta yang ingin bergabung. Namun, dalam tiga tahun terakhir, terjadi

ketidaksesuaian dalam proses seleksi, di mana jumlah peserta yang diterima tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Selain itu, keterbatasan tenaga teknis di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sukabumi juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program ini.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi Program Sukabumi Kelurahan Entrepreneurship Center (Sukabumi Kece) dalam meningkatkan potensi ekonomi kreatif di Kota Sukabumi Jawa Barat. Evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program di masa mendatang.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali data secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi secara alami dengan berfokus pada makna, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian. Penelitian ini berfokus pada fenomena yang telah dipaparkan dalam latar belakang dan identifikasi masalah yang ditemukan di lapangan. Fokus utama penelitian ini adalah evaluasi program Sukabumi Kelurahan Entrepreneurship Center (SUKABUMI KECE) dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif di Kota Sukabumi. Untuk menganalisis evaluasi program tersebut, penelitian ini menggunakan teori Leo Agustino (2023), yang mencakup lima indikator utama yang akan dijelaskan lebih lanjut.

1. Sumber Daya Aparatur (SDA), yang melaksanakan kebijakan menentukan bagaimana implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan. Dalam pelaksanaan evaluasi, sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan adalah sumber daya manusia yang mengenali, mengerti, dan memahami tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan.
2. Kelembagaan, Kesuksesan tujuan kebijakan bergantung pada pengelolaan kelembagaan oleh elit pengambilan keputusan.
3. Sarana, Prasarana dan Teknologi, merupakan kriteria lain yang dapat digunakan untuk menilai suatu evaluasi publik.
4. Keuangan, sangat penting untuk diperhatikan dan diperhitungkan dalam pelaksanaan kebijakan karena menjadi faktor pendukung kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang tidak mendukung dengan baik dapat menghambat pelaksanaan proyek atau kebijakan.
5. Regulasi, suatu kebijakan terkadang memerlukan regulasi pendukung agar dapat dioperasionalkan lebih aplikatif.

Dalam penelitian mengenai evaluasi program Sukabumi Kelurahan Entrepreneurship Center (SUKABUMI KECE) berlokus di Kota Sukabumi. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama proses pengumpulan data di lapangan dan setelah proses pengumpulan data selesai. Seperti yang dipaparkan oleh Miles & Huberman dalam (Sugiyono, 2020:488), bahwa analisis terdiri dari tiga alur kerja yang terjadi secara bersamaan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil dan olahan data penelitian, dapat ditinjau menggunakan teori sebagai berikut:

1. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Sumber Daya Aparatur (SDA) menilai kebijakan berdasarkan kualitas aparatur yang tersedia. Dalam penelitian ini, peneliti dapat mengevaluasi sub dimensi SDA, seperti Kompetensi, Karakter Aparatur/Individu, dan Integritas. Sub dimensi tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana sumber daya aparatur mendukung keberhasilan program, baik dari aspek kualitas, jumlah, maupun sistem kerja yang diterapkan.

Adapun penjabaran dari kompetensi ini merujuk pada kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sumber daya ini mencakup pengetahuan, keterampilan, serta perilaku individu saat bekerja. Dengan demikian, secara sederhana, kompetensi menggambarkan kapasitas seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Selain itu, adanya Karakter aparatur atau individu merupakan faktor lainnya yang memengaruhi kualitas tindakan serta kepercayaan yang diterima dari masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Karakter ini berperan sebagai kunci utama dalam mencapai keberhasilan di berbagai aspek kehidupan. Sedangkan, Integritas merupakan sifat pribadi yang mencerminkan kejujuran, konsistensi, serta keselarasan antara nilai-nilai moral dan tindakan seseorang. Integritas menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan serta kredibilitas. Bagi individu, integritas mencerminkan karakter yang baik, sedangkan dalam suatu institusi atau organisasi, integritas berperan sebagai budaya organisasi yang positif.

Program kewirausahaan ini merupakan yang pertama di Kota Sukabumi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman aparatur, dilakukan pelatihan serta pembinaan. Jika kita meninjau hasil penelitian serta pemaparan data, baik dari data yang telah diolah maupun hasil wawancara dengan beberapa informan dalam Evaluasi Program Sukabumi Kece, maka terlihat bahwa aparatur yang terlibat dalam kompetensi sumber daya aparatur dalam program ini dinilai sudah cukup kompeten serta memiliki keahlian yang sesuai dengan bidangnya. Berbagai pelatihan dan pembinaan telah dilaksanakan, termasuk pelatihan bagi Tim Sukabumi Kece dalam mendampingi UMKM. Selain itu, dinas terkait juga telah melakukan studi banding ke Kota Batam, yang saat itu telah menjalankan program serupa dengan Sukabumi Kece, para aparatur mempelajari program yang dilaksanakan sebagai gambaran dalam pelaksanaan sukabumi kece. Komponen lainnya selain keberhasilan mencapai tujuan tepat waktu dan menyusun laporan secara transparan, SDA juga sudah mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menghadirkan pelatih yang kompeten, yang dibuktikan dengan adanya sertifikasi kompetensi bagi pendamping UMKM tersebut.

Meskipun kualitas SDA dalam program ini tergolong baik, efisiensinya masih menjadi tantangan, terutama karena jumlah personel di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sukabumi dinilai kurang memadai dibandingkan dengan beban kerja yang ada.

2. Kelembagaan

Menurut Agustino (2023: 84), kelembagaan tidak hanya mengacu pada organisasi formal, tetapi juga mencakup nilai-nilai, kebiasaan, serta mekanisme yang telah berkembang secara historis dalam suatu komunitas atau pemerintahan. Evaluasi kelembagaan bertujuan

untuk menilai sejauh mana suatu institusi mampu menjalankan fungsi dan perannya secara efektif. Salah satu aspek utama yang dinilai adalah kepemimpinan. Kepemimpinan yang kuat akan memberikan arah yang jelas, menciptakan visi yang inspiratif, serta mampu menggerakkan seluruh elemen dalam organisasi menuju pencapaian tujuan. Pemimpin yang efektif juga harus memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat serta membangun budaya kerja yang positif di lingkungan institusi.

Selain itu, manajemen organisasi menjadi aspek krusial dalam evaluasi kelembagaan. Manajemen yang baik mencakup perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, serta efektivitas dalam mengatur proses kerja. Sistem manajemen yang efisien akan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Kelemahan dalam manajemen dapat menghambat kinerja organisasi dan mengurangi efektivitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Koordinasi dan kolaborasi juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan suatu kelembagaan. Organisasi yang memiliki sistem koordinasi yang baik akan lebih mudah dalam menyinkronkan tugas dan tanggung jawab antarunit kerja. Sementara itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, dapat meningkatkan efektivitas program dan memperkuat jaringan kerja. Tanpa koordinasi dan kolaborasi yang baik, institusi dapat mengalami hambatan dalam menjalankan tugasnya secara efisien.

Terakhir, komunikasi yang efektif menjadi elemen kunci dalam evaluasi kelembagaan. Komunikasi yang baik memungkinkan informasi disampaikan dengan jelas dan akurat, baik di dalam organisasi maupun kepada pihak eksternal. Dengan sistem komunikasi yang transparan dan terbuka, setiap anggota organisasi dapat memahami perannya dengan lebih baik, serta membangun kepercayaan antara lembaga dan masyarakat yang dilayaninya. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman, konflik internal, dan menurunnya kinerja kelembagaan secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan yang diperoleh, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi berperan sebagai pemimpin yang memberikan arahan kepada bawahannya, termasuk Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sukabumi serta Tim Sukabumi Kece. Kedua pihak bertindak sebagai pelaksana teknis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program. Selain itu, Tim Sukabumi Kece turut berkontribusi dalam menghadirkan ide-ide inovatif agar program tetap dinamis. Para penyelenggara program juga menunjukkan responsivitas terhadap kendala yang muncul dan rutin mengadakan forum diskusi untuk mencari solusi. Namun, diperlukan peningkatan dalam aspek pengawasan dan evaluasi dari pemimpin agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal.

Dalam aspek manajemen organisasi, program telah dijalankan dengan baik, tetapi masih terdapat individu yang kurang bertanggung jawab terhadap tugasnya. Monitoring dilakukan terbatas saat kunjungan pejabat daerah, dan evaluasi hanya berdasarkan laporan tahunan. Koordinasi sudah rutin dilakukan melalui rapat saat pembukaan batch baru dan di akhir tahun, dan kolaborasi sudah terjalin dengan SMK 3 Kota Sukabumi dalam penyediaan fasilitas dan tenaga pengajar vokasi. Serta, komunikasi publik juga efektif melalui berbagai saluran, seperti kelurahan, grup WhatsApp, dan media sosial.

Adapun kelemahan dalam program ini terletak pada kurangnya sistem evaluasi yang mendalam dapat menghambat identifikasi kelemahan dalam program, sehingga perbaikan menjadi kurang responsif. Evaluasi yang hanya berbasis laporan tahunan membuat efektivitas kebijakan sulit diukur, berisiko menurunkan kualitas program, serta menghambat

inovasi (Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004). Tanpa pemantauan berkala, akuntabilitas penyelenggara program juga melemah, meningkatkan risiko ketidakefisienan dan penyalahgunaan wewenang (Funnell & Rogers, 2011). Oleh karena itu, diperlukan penguatan evaluasi melalui pemantauan rutin, indikator keberhasilan yang jelas, dan keterlibatan evaluator independen agar kebijakan lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Sarana, Prasarana dan Teknologi

Menurut Agustino (2023: 84), sarana, prasarana, dan teknologi merupakan elemen krusial dalam mendukung keberhasilan suatu program. Berdasarkan hasil penelitian, fasilitas dalam Program Sukabumi Kece dinilai cukup memadai berkat kerja sama dengan SMK 3 Kota Sukabumi. Penyediaan sarana disesuaikan dengan permintaan dinas dan jenis pelatihan vokasi yang diberikan. Selain itu, panitia turut menyediakan perlengkapan bagi peserta, seperti alat tulis, tas kecil, name tag, buku catatan, dan modul kewirausahaan. Dari segi prasarana, lokasi kegiatan yang berada di lingkungan sekolah telah memenuhi aspek kenyamanan dan keamanan bagi peserta. Namun, pengawasan terhadap sarana dan prasarana belum dilakukan secara khusus oleh dinas maupun Tim Sukabumi Kece. Meskipun demikian, dinas memastikan bahwa kebutuhan utama telah tersedia, meskipun jumlahnya masih terbatas. Kelemahan ini bisa menjadi serius jika tidak diperhatikan karena kurangnya pengawasan khusus terhadap fasilitas yang digunakan juga berisiko menurunkan efisiensi pemanfaatannya. Tanpa sistem monitoring yang terstruktur, sulit untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana digunakan secara maksimal dan sesuai dengan kebutuhan (Funnell & Rogers, 2011). Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan dalam pengadaan fasilitas serta pengawasan yang lebih ketat guna mendukung keberlanjutan program secara lebih efektif (Chen, 2015).

Dalam aspek teknologi, Program Sukabumi Kece telah berupaya memanfaatkan internet secara maksimal. Selain menyediakan akses Wi-Fi, panitia juga menghadirkan mentor bersertifikasi untuk membimbing peserta dalam proses digitalisasi. Peserta diberikan materi dan praktik langsung mengenai pembuatan akun toko online di platform seperti Shopee dan Tokopedia, serta bantuan dalam pembuatan website. Salah satu indikator keberhasilan program ini adalah jumlah peserta yang mencapai 1.500 orang dengan tingkat antusiasme yang tinggi, terutama dalam sesi diskusi terkait digitalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan edukasi mengenai pemanfaatan internet dan teknologi dalam dunia bisnis.

4. Keuangan

Dimensi keuangan menurut Agustino (2023:91) adalah salah satu aspek penting yang berfungsi untuk menilai efektivitas dan efisiensi suatu kebijakan atau program. Keuangan berperan dalam menentukan sejauh mana suatu program dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Ketersediaan dana yang cukup serta pengelolaan anggaran yang baik menjadi faktor utama dalam keberlanjutan program. Jika suatu kebijakan tidak memiliki dukungan finansial yang memadai, maka pelaksanaannya akan menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan kegiatan, pengurangan skala program, atau bahkan penghentian program secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Sukabumi Kece didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi. Namun, karena keterbatasan fiskal daerah, pendanaannya dialihkan ke Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau (DBHCHT). Perubahan ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program, mengingat Sukabumi Kece merupakan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi periode 2018–2023. Pergeseran sumber pembiayaan ini membawa dampak terhadap struktur dan implementasi program, khususnya dalam hal pendampingan yang awalnya dirancang berlangsung selama enam bulan, namun direduksi menjadi hanya dua hari. Kondisi ini mencerminkan bagaimana fleksibilitas anggaran seringkali menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan program prioritas di tingkat daerah.

Fenomena ini diperkuat oleh temuan dalam Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIAN), yang menunjukkan bahwa keberhasilan program pemerintah daerah sangat tergantung pada stabilitas dan kecukupan sumber pembiayaan. Dalam studi kasus di Jombang, pemerintah daerah memanfaatkan dana intensif keagamaan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan guru TPQ, membuktikan bahwa adaptasi sumber dana menjadi strategi penting agar program tetap berjalan meski dalam keterbatasan anggaran (Mukarromah, 2016).

Selain itu, keterlambatan pencairan anggaran juga menjadi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Dalam beberapa kesempatan, dana belum tersedia saat kegiatan seharusnya dilaksanakan, sehingga panitia harus menyesuaikan jadwal. Beruntungnya, pada kondisi tersebut, kegiatan masih dalam tahap persiapan dan belum melibatkan peserta, sehingga tidak berdampak langsung pada mereka. Meskipun demikian, keterlambatan pencairan dana tetap berpotensi menghambat efektivitas program jika tidak segera diatasi. Jika kondisi serupa terjadi pada tahap yang sudah melibatkan peserta, maka dapat mengganggu proses pelaksanaan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program. Keterlambatan ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan perlu lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan operasional. Penguatan mekanisme penganggaran dan distribusi dana yang lebih tepat waktu menjadi hal yang perlu diperbaiki agar keberlanjutan program dapat terjamin tanpa mengalami kendala administratif yang berarti.

5. Regulasi

Regulasi memegang peranan penting dalam memastikan arah dan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Menurut Leo Agustino (2023:92), regulasi tidak hanya mengatur tetapi juga mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan program secara menyeluruh. Dalam konteks Program Sukabumi Kece, regulasi yang digunakan sebagai dasar hukum berasal dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi periode 2018–2023. Aturan tersebut dituangkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/KOPDAGRIN/2019 yang mengatur struktur tim pelaksana serta tugas-tugasnya. Namun, dokumen ini belum dilengkapi dengan petunjuk teknis maupun peraturan pelaksana lainnya, sehingga kurang kuat dari sisi hukum dan operasional.

Pemahaman terhadap regulasi dalam program ini pun tidak hanya sebatas aturan tertulis, tetapi juga mencakup bagaimana mekanisme pelaksanaan dijalankan di lapangan. Misalnya, pentingnya penyesuaian metode penyampaian materi pelatihan sesuai dengan karakteristik peserta, serta strategi sosialisasi melalui berbagai media seperti roadshow dan platform digital. Meski program ini berhasil mencetak sekitar 1.500 wirausaha baru, capaian tersebut belum terklasifikasi dengan baik sehingga outcome program sulit diukur secara konkret.

Lebih lanjut, dalam proses pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi, seperti pengisian peserta oleh siswa SMK dan keterlibatan warga luar daerah.

Hal ini menunjukkan lemahnya sistem seleksi serta minimnya pengawasan yang efektif. Menurut Agustino, efektivitas suatu kebijakan ditentukan oleh kesesuaian antara rencana, pelaksanaan, dan hasil yang diharapkan.

Penelitian oleh Krisantari dan Sukarno dalam Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIAN) juga menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada kejelasan struktur birokrasi dan mekanisme komunikasi dalam pelaksanaannya. Ketidakhadiran regulasi teknis dan lemahnya koordinasi antarunit pelaksana akan menghambat pencapaian tujuan program secara maksimal (Krisantari & Sukarno, 2014).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan sebelumnya, disimpulkan bahwa Evaluasi Program Sukabumi Kelurahan Entrepreneurship Center (SUKABUMI KECE) dalam Meningkatkan Potensi Ekonomi Kreatif di Kota Sukabumi belum optimal. Hal ini dapat ditandai melalui beberapa aspek berikut:

1. Dimensi sumber daya aparatur dalam pelaksanaan Program Sukabumi Kelurahan Entrepreneurship Center (Sukabumi Kece) dapat dikatakan telah menunjukkan tingkat optimalisasi yang cukup baik. Hal ini tercermin dari kompetensi aparatur yang terlibat, di mana sebagian besar telah memiliki kualifikasi dan keahlian yang relevan dengan tugas pendampingan pelaku UMKM. Berbagai bentuk pelatihan dan pengembangan kapasitas telah diselenggarakan, termasuk pelatihan teknis khusus bagi Tim Sukabumi Kece, sebagai upaya memperkuat peran mereka dalam mendampingi pelaksanaan program di lapangan. Namun demikian, masih ditemukan kendala berupa ketimpangan antara beban kerja dan jumlah sumber daya manusia yang tersedia. Untuk menjawab tantangan ini, disarankan agar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sukabumi melakukan penambahan tenaga pendukung guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas utama. Selain itu, diperlukan penguatan integritas dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui mekanisme pembagian tugas yang lebih terstruktur dan sistematis, baik pada tahap pelaksanaan maupun pascaprogram.
2. Dimensi kelembagaan dalam Program Sukabumi Kece masih belum optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya kesadaran individu dalam menjalankan tugas, lemahnya sistem monitoring dan evaluasi yang belum terstruktur dengan baik, serta kurang efektifnya penggunaan media sosial dalam menyebarkan informasi. Hal ini tercermin dari kurangnya komitmen pelaksana terhadap tugas institusional, lemahnya sistem monitoring serta belum maksimalnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi dan promosi program. Untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan, Pemerintah Kota Sukabumi perlu mengambil langkah afirmatif dalam memastikan bahwa setiap pelaksana program menjalankan tugas secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan. Penguatan koordinasi lintas sektor juga menjadi urgensi, agar tercipta sinergi antar pemangku kepentingan yang mampu mendukung implementasi program secara holistik dan berkelanjutan.
3. Dimensi sarana, prasarana dan teknologi dalam program SUKABUMI KECE telah optimal. Beberapa saran yang peneliti buat dalam dimensi ini bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sukabumi perlu membangun database UMKM untuk memantau kualitasnya secara berkelanjutan, sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi pengembangan potensi ekonomi kreatif di Kota Sukabumi.

4. Pada dimensi keuangan, menunjukkan bahwa sumber dana yang tersedia telah dikelola dengan baik. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dapat menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan lembaga non-pemerintah, guna memastikan keberlanjutan program. Selain itu, pemanfaatan media untuk promosi dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan jangkauan sosialisasi meskipun tanpa dukungan anggaran yang besar dari pemerintah.
5. Pada dimensi regulasi dalam Program Sukabumi Kece masih belum optimal. Ketidakesesuaian kriteria peserta dan kurangnya kategorisasi jumlah wirausaha yang berhasil setelah mengikuti program menjadi kendala utama. Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang lebih konkret dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM di Kota Sukabumi. Selain itu, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sukabumi harus menyusun pedoman teknis yang mencakup indikator keberhasilan, sehingga hasil evaluasi program dapat lebih jelas, terstruktur, dan terukur.

Referensi

- Adiputra, I. G., Kimnova, C., & Deviana, R. (2024). Pelatihan Ekonomi Kreatif untuk Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan bagi Pelaku UMKM di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia*, 2(4), 427-434.
- Agustino, Leo. (2023). *Memahami Evaluasi Kebijakan : perspektif teoretis dan praktis*. Malang: E Alifuddin, Moh dan Mashur Razak. (2015). *Kewirausahaan: Strategi Membangun Kerajaan Bisnis*. Jakarta: MAGNAScript.
- Alkaf, Fatima, Tuzzahara. (2019). *Modul Pengantar Kewirausahaan*. Jakarta: FEB Universitas Pancasila.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Fikri, M. A. A. (2022). Evaluasi pelaksanaan program kewirausahaan di sekolah insan al madani bogor. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, dan Agama*, 8(1), 233-240.
- Fitri Sri Nuraeni, Nurmilah, Acep Suherman, R. (2023). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Commerce (UMKM Kota Sukabumi)*. *Akuntansi'45*, 316-335.
- Ginting, A. M., Rivani, E., Saragih, J. P., & Wuryandani, D. (2018). *Strategi pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.mpatdua Media.
- Hasanah, B., Sururi, A., Prananda, D. P., & Noval, A. M. (2022). Evaluasi Program Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Model Kewirausahaan Sosial Di Kota Serang). *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 15(2), 197-210.
- Insana, D. R. M., Yolanda, Y., & Susilastuti, D. (2022). Pengaruh ekonomi kreatif terhadap kemiskinan di pulau jawa. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 8(3), 352-365.
- Krisantari, A. T., & Sukarno, A. W. (2014). *Peran humas dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Bank Indonesia: Studi kasus pada Bank Indonesia Call & Interaction (BICARA)*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIAN).
- Laia, A., Lase, D., Waruwu, S., & Buulolo, N. A. (2024). Evaluasi Pelatihan Keterampilan di Kantor Dinas Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Gunungsitoli. *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 34-31.
- Mukarromah, N. (2016). *Program pemerintah daerah bidang kesejahteraan rakyat dalam pembinaan profesionalisme guru Taman Pendidikan Al-Qur'an: Studi kasus di Kecamatan Bareng Jombang*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIAN).



- Nurhidayah, N., Masyhuri, M., Rohmani, Z., Wahyuni, B. T., Mahsuruddin, M., & Febriyana, S. H. (2024). Evaluasi Program Kewirausahaan Di Sekolah Dasar Menggunakan Metode Cippo. *Renjana Pendidikan Dasar*, 4(1), 63-69.
- Pramita, N. C., Herawati, A. R., & Subowo, A. (2023). Evaluasi Penyelenggaraan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) di Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Barat. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 1-12.
- Primatami, A., & Primadhita, Y. (2021). Evaluasi Efisiensi Sektor Ekonomi Kreatif pada Wirausaha Muda di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 6(2), 20-31.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yurisa, D., Marom, A., & Nurcahyanto, H. (2023). Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Program Sukabumi Creative Hub. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(2), 130-148.